



## Badung Kebut Proyek Underpass

### Kumpulkan 32 Sertifikat Lahan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai

**MANGUPURA** - Rencana pengerjaan underpass simpang Patung Ngurah Rai terus dikedub. Bahkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung sudah mengumpulkan 32 sertifikat yang akan terkena pengerjaan fisik proyek tersebut. Apalagi, underpass itu rencananya sudah beroperasi pada 2018 saat pertemuan IMF di Bali.

Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Badung Sang Nyoman Oka Permana mengakui, pihaknya hanya bertugas untuk pembebasan lahan. Sementara untuk pembangunan fisik underpass dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah VIII. Namun, Pemkab Badung mendukung penuh pembangunan underpass ini untuk biaya pembebasan lahan tersebut. "Sekarang posisi tender konsultasi appraisal. Pendataan warga di Tuban sudah minggu lalu kami laksanakan,"

### PROYEK UNDERPASS SIMPANG PATUNG NGURAH RAI

- Proyek underpass dipersiapkan untuk pertemuan IMF di Bali pertengahan 2018.
- Badung memasang anggaran hingga Rp 85 miliar untuk pembebasan lahan.

- Sampai saat ini, Dinas PUPR Badung sudah mengumpulkan 32 sertifikat.
- Beberapa ruko rencananya terkena proyek tersebut.
- Yang menjadi kendala adalah perubahan jaringan pipa PDAM.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

katanya, Senin (7/8) kemarin. Dari hasil pendataan untuk pembebasan lahan ada puluhan

sertifikat dikumpulkan. Sertifikat itu kebanyakan berupa bangunan ruko. "Saat ini ada 32 sertifikat

baru terkumpul dan itu kebanyakan ruko," tandas dia. Nah, setelah dilakukan pendataan awal baru nanti kelihatan total jumlah sertifikat yang kena pembebasan lahan. Setelah itu baru dilakukan konsultasi publik. "Rencananya Minggu ini kami lakukan konsultasi publiknya," ungkapnya. "Setelah ada pemenang tender, appraisal langsung bisa kerja. Untuk laporan penilaian paling lambat sebulan. Setelah pembayaran semuanya selesai sudah tugas kami di PUPR Badung, dan fisiknya dikerjakan oleh BPJN," imbuh dia.

Sementara itu pihak PDAM Tirta

Mangutama menolak menggunakan dana setoran ke kas daerah untuk pembiayaan pemerintahan pemindahan utilitas terkait proyek Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai. PDAM takut menggunakan dana tersebut, karena akan melanggar Perda 6 tahun 2005 tentang PDAM. Dari hasil hitung-hitungan, anggaran pemindahan utilitas bisa ditekan menjadi Rp 21 miliar, dari perhitungan awal Rp 22,8 miliar.

Dirut PDAM Tirta Mangutama Badung Ketut Golak menjelaskan akan menggunakan cadangan dana investasi yang dimiliki sebesar Rp 5 miliar, sedangkan sisanya

akan meminta ke Pemkab Badung. "Kalau menggunakan dana itu (setoran ke kas daerah) tidak mungkin. Kalau dipaksakan itu akan melanggar perda," sebut dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyatakan komitmennya memasang anggaran hingga Rp 85 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan underpass Simpang Ngurah Rai. Anggaran sebesar ini dipasang pada APBD Perubahan Badung 2017. Bupati Giri Prasta menyatakan megaprojek ini dipastikan berjalan untuk mendukung pertemuan IMF pada pertengahan 2018 mendatang. (dwi/gup)

Edisi : Selasa, 8 Agustus 2012

Hal : \_\_\_\_\_